

ANALISIS PENGGUNAAN DIKSI DAN GAYA BAHASA DALAM DEBAT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

Eliana⁽¹⁾, Junaidi⁽²⁾,

¹Bahasa Indonesia, Unisai, Samalanga.

²Bahasa Indonesia, Unisai, Samalanga.

e-mail: eliana@unisai.ac.id, junaidi@unisai.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to examine the use of diction and rhetorical style in the 2024 Aceh gubernatorial and vice-gubernatorial candidate debate. The approach used is a qualitative approach and case study design, conducted using the Fairclough Critical Discourse Analysis (AWK) framework. Data were obtained from official transcripts, video recordings uploaded on YouTube, and media reports. The results of the analysis show four main themes: Islamic rhetoric, local populism, narratives of sharia and justice, and insinuating contrasting rhetoric. The candidates use diction such as "small people", "marwah sharia", and "trustworthy leaders" to build a political image that is in harmony and balance with the collective identity of the Acehnese people and the values of their ancestors. These findings demonstrate that language in political debates not only conveys programs and persuasion, but also represents ideology and cultural values. This research enriches the study of political communication and provides practical guidance for political actors in crafting messages that are persuasive, ethical, and rooted in local cultural contexts.

Keywords: *political rhetoric, diction, critical discourse.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan diksi dan gaya retorika dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh 2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, analisis dilakukan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough. Data diperoleh dari transkrip resmi, rekaman video yang diunggah di youtube, dan laporan media. Hasil analisis menunjukkan empat tema utama: retorika Islami, populisme lokal, narasi syariat dan keadilan, serta retorika kontras yang insinuatif. Para kandidat menggunakan diksi seperti “*rakyat kecil*”, “*bermarwah syariat*”, dan “*pemimpin amanah*” untuk membangun citra politik yang selaras dan seimbang dengan identitas kolektif masyarakat Aceh serta nilai-nilai leluhur masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa dalam debat politik tidak hanya menyampaikan program dan rayuan semata, tetapi juga mempresentasikan ideologi dan nilai budaya. Penelitian ini memperkaya studi komunikasi politik dan memberikan panduan praktis bagi aktor politik dalam menyusun pesan yang persuasif, etis, dan berakar pada konteks budaya lokal.

Kata kunci: Diksi, Retorika politik, wacana kritis, Debat Politik.

PENDAHULUAN

Di era demokrasi kontemporer, debat politik telah menjelma menjadi panggung publik yang signifikan, menjadi sarana transparansi ide dan arena kontestasi narasi antar kandidat. Di banyak negara, debat bukan sekadar media penyampaian program, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan citra diri dan pembentuk opini masyarakat. Para kandidat saling berlomba menunjukkan keunggulan retorik melalui pemilihan kata yang tajam serta gaya tutur yang memikat. Realitas ini menunjukkan bahwa bahasa dalam debat bukan hanya alat penyampaian pesan, tetapi juga merupakan alat kekuasaan yang strategis. Setyonegoro (2025) mengatakan bahwa Indonesia menampilkan dinamika komunikasi politik yang semakin kompleks, terutama dengan maraknya penggunaan media digital dan narasi berbasis ideologi, agama, serta identitas sosial. Oleh karenanya, pendekatan linguistik terhadap debat politik menjadi kajian yang sangat relevan secara akademis.

Di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), debat kandidat digunakan sebagai medium untuk memperkenalkan visi, misi, dan kredibilitas politik setiap calon. Lebih dari itu, debat menjadi ajang penampilan identitas politik yang dikonstruksi secara strategis lewat bahasa. Dalam implementasinya, bahasa debat kerap dibalut simbolisme, ekspresi idiomatik lokal, hingga narasi keagamaan atau nasionalistik guna menjangkau emosi pemilih. Kandidat menggunakan frasa seperti “rakyat kecil”, “pemimpin amanah”, atau “kita bangkit bersama” sebagai bentuk retorika populis. Ini menegaskan pentingnya pemilihan kata dan gaya retorik dalam membentuk dinamika debat politik daerah.

Debat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024 menyuguhkan karakteristik unik, baik dalam konteks kultural maupun dalam bentuk-bentuk ekspresi linguistiknya. Aceh sebagai wilayah dengan status otonomi khusus memiliki corak politik dan budaya yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nilai-nilai Islam, pengalaman sejarah konflik dan perdamaian, serta warisan budaya lokal menjadi fondasi penting untuk memahami bangunan bahasa politik setempat. Oleh sebab itu, penggunaan diksi dalam debat politik Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai syariat, simbol-simbol identitas daerah, serta narasi perdamaian. Fenomena ini patut dikaji karena merefleksikan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan budaya secara mendalam.

Dalam bidang ilmiah, berbagai studi telah menunjukkan bahwa penggunaan gaya bahasa dalam debat politik memainkan peran dalam memperkuat konstruksi pesan politik, membentuk citra diri, serta menambah daya tarik komunikatif. Kandidat tidak sekadar menyampaikan agenda, melainkan membentuk kesan publik melalui teknik-teknik linguistik seperti metafora, repetisi, ironi, dan eufemisme. Mohammad et al. (2021) mengungkap bahwa gaya bahasa yang bersifat religius dan afirmatif sering muncul dalam dakwah dan telah merambah ranah politik. Strategi semacam ini terbukti mampu membangun ikatan emosional kolektif serta memperkuat kesan keaslian kandidat. Oleh karena itu, analisis gaya bahasa sangat diperlukan untuk memahami strategi komunikasi yang tersembunyi dalam debat.

Beberapa penelitian juga mengemukakan bahwa pilihan diksi mencerminkan kecenderungan ideologis, orientasi audiens, serta identitas politik yang ingin ditegaskan oleh kandidat.

Contohnya, kata-kata seperti “berdaulat”, “adil”, atau “berkearifan lokal” bukanlah sekadar kata netral, melainkan memuat makna sosial dan politik tertentu. (Yulianita, n.d.) mencatat bahwa gaya bahasa dalam debat kandidat kepala daerah mencerminkan pembentukan karakter politik serta strategi persuasi yang diarahkan secara sadar. Sementara itu, audiens merespons bahasa tersebut baik secara emosional maupun intelektual. Hal ini menandakan bahwa komunikasi dalam debat bersifat interaktif, bukan hanya penyampaian monolog.

Akan tetapi, studi yang secara khusus meneliti diksi dan gaya bahasa dalam debat kandidat kepala daerah di Aceh masih sangat minim. Literatur yang tersedia lebih banyak membahas tentang wacana media, kampanye visual, atau retorika dalam khutbah keagamaan. Padahal, debat politik sebagai teks lisan yang terstruktur menyimpan potensi data linguistik yang kaya. Misalnya, penelitian oleh Mohammad et al. (2021) lebih berfokus pada narasi hikayat, namun belum menyentuh aspek komunikasi politik kontemporer. Hal ini menciptakan kekosongan ilmiah (*literature gap*) yang layak diisi melalui pendekatan kontekstual dan berbasis data.

Mayoritas penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan linguistik struktural yang belum mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam penggunaan bahasa. Pendekatan ini cenderung mengabaikan fakta bahwa bahasa merupakan refleksi dari kompleksitas sosial. Di Aceh, budaya Islam, adat, serta dinamika pasca-konflik memberi pengaruh besar terhadap bahasa politik. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif kualitatif menjadi lebih tepat untuk menggali makna dari diksi dan gaya bahasa yang digunakan kandidat. Penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan tersebut secara holistik dan reflektif.

Sebagai kerangka metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagaimana dikembangkan oleh (Bacchini, 2018), untuk membedah relasi kuasa, ideologi, dan representasi dalam teks debat. Dengan pendekatan ini, bahasa tidak lagi dianggap sebagai medium netral, melainkan sebagai medan pertarungan simbolik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana bahasa digunakan untuk mempengaruhi audiens, menyusun narasi kekuasaan, serta mendefinisikan kenyataan politik. Triwicaksono & Nugroho (2021) juga menunjukkan efektivitas dalam membongkar makna tersembunyi dalam komunikasi politik. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menelaah debat kandidat Aceh 2024.

Selain itu, diksi yang digunakan dalam debat juga mencerminkan sikap, nilai, serta posisi kandidat terhadap isu-isu strategis seperti syariat Islam, kemiskinan, pendidikan, serta hubungan dengan pemerintah pusat. Ragam gaya Bahasa formal, simbolik, naratif, maupun kolokial dipakai untuk mengaitkan program dengan identitas kolektif masyarakat. Erwin (2024) Bahasa politik merupakan sarana utama untuk membentuk identitas. Hal ini, gaya bahasa bukan hanya bernilai estetis, tetapi juga memiliki fungsi pragmatis sebagai alat bujuk dan pengaruh. Strategi ini makin krusial di masyarakat yang identitas politiknya sangat kuat, seperti Aceh. Maka, kajian ini memiliki nilai penting secara teoretis dan praktis.

Penelitian ini mengkaji aspek linguistik dalam transkrip debat resmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024. Chaer (2012) Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah — mencakup struktur, makna, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Fokus analisis diarahkan pada pilihan diksi dan gaya bahasa yang

ditampilkan oleh para kandidat. Peneliti menelaah bentuk-bentuk retorika seperti metafora politik dan struktur retorik lainnya dalam kerangka debat. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana kandidat menyusun pesan politik melalui bahasa. Respons publik terhadap pesan-pesan tersebut juga menjadi bagian penting dari analisis komunikasi dua arah ini.

Dari sisi kontribusi ilmiah, riset ini memperkaya kajian linguistik politik melalui pendekatan lokal dan kontekstual. Aceh sebagai studi kasus menyuguhkan keunikan sosial-budaya yang sangat memengaruhi cara komunikasi politik dilakukan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan model analisis gaya bahasa dalam debat politik lokal Indonesia. Selain itu, kajian ini memperkuat teori retorika politik yang berbasis pada budaya dan agama. Ini menjadi kontribusi penting untuk memperluas cakupan linguistik terapan di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan strategis bagi kandidat dan tim kampanye agar dapat membangun komunikasi politik yang lebih etis dan efektif. Pemahaman yang mendalam mengenai diksi dan gaya bahasa akan membantu meningkatkan kualitas komunikasi politik para kandidat. Sementara itu, publik dan media juga diharapkan menjadi lebih kritis dalam menanggapi retorika politik. Hal ini penting untuk menumbuhkan demokrasi lokal yang beretika dan substansial. Dalam jangka panjang, penelitian ini turut memperkuat kualitas perdebatan politik lokal.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis struktur linguistik dalam debat kandidat, melainkan juga mengkaji bahasa sebagai instrumen produksi makna dan kekuasaan. Peneliti mengajak pembaca memahami debat politik sebagai ruang produksi wacana, bukan semata-mata

penyampaian program kerja. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana kata-kata dipilih, diatur, dan ditampilkan untuk membentuk realitas politik tertentu. Hal ini sejalan dengan pendekatan kritis dalam linguistik dan komunikasi politik. Dengan demikian, riset ini diharapkan memberi sumbangsih akademik dan praktis dalam membangun demokrasi lokal yang berakar pada tradisi dialog dan bahasa reflektif

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena penggunaan bahasa dalam situasi spesifik, yakni debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024. Studi kasus dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi latar sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi pemilihan diksi serta gaya berbahasa masing-masing kandidat. Pilihan ini sejalan dengan pendapat Yin (2020) yang menyatakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dalam konteks kejadian kontemporer. Dalam kerangka ini, fokus penelitian melampaui aspek struktur bahasa semata, dengan turut menyoroti makna dan ideologi yang tersirat di dalamnya.

Untuk menganalisis struktur serta makna dari bahasa yang digunakan dalam debat, penelitian ini mengandalkan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Bacchini (2018). Pendekatan ini mengintegrasikan analisis mikro-linguistik (seperti pilihan diksi dan gaya) dengan konteks sosial makro yang mencakup ideologi, kekuasaan, dan budaya. Pendekatan ini dinilai mampu mengungkap bagaimana bahasa dan kekuasaan saling berkaitan dalam praktik sosial, khususnya dalam komunikasi politik. Agustina (2024) menjelaskan bahwa pendekatan AWK

memungkinkan peneliti menelaah bahasa sebagai praktik sosial yang bisa mereproduksi maupun menantang struktur kekuasaan yang dominan. Dengan demikian, model ini dianggap paling tepat dalam menganalisis strategi komunikasi politik yang muncul dalam debat kandidat di Aceh.

Sumber data utama berasal dari dokumen rekaman video serta transkrip resmi debat publik yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Peneliti juga mengumpulkan dokumen pelengkap seperti artikel berita, opini, dan kutipan dari media sosial yang relevan untuk memperluas pemahaman terhadap konteks wacana. Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode utama pengumpulan data, karena fokus penelitian adalah pada teks, baik lisan maupun tertulis, dalam situasi komunikasi formal. Sejalan dengan itu, Miles (2020) menekankan bahwa dokumentasi merupakan strategi yang sangat efektif dalam analisis wacana, terutama bila data berasal dari media resmi yang dapat diverifikasi secara publik. Rulam (2016) mengatakan dokumen adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman khusus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi baik dari sisi sumber maupun metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari video debat, transkrip resmi, dan laporan media daring yang membahas jalannya debat. Selain itu, dilakukan member checking secara terbatas melalui diskusi bersama ahli bahasa dan pengamat politik di Aceh, guna memastikan interpretasi terhadap makna diksi dan gaya bahasa kandidat lebih akurat. Proses validasi ini bertujuan untuk meminimalkan bias interpretatif serta meningkatkan kredibilitas hasil analisis. Menurut Moleong (2017), penerapan

triangulasi dan konfirmasi dari para ahli merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif agar hasil yang diperoleh reflektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles (2020) , yang mencakup tiga tahap pokok: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Data yang dikumpulkan dikode secara terbuka guna mengidentifikasi tema-tema utama seperti gaya bahasa populis, religius, persuasif, maupun simbolik. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi serta interpretasi terhadap makna diksi yang digunakan, dikaitkan dengan posisi ideologis dari masing-masing kandidat. Proses reduksi dan penyajian data dilakukan dengan menyusun kutipan pernyataan para kandidat ke dalam tabel tematik, yang kemudian dianalisis dari sisi linguistik dan wacana. Model ini memungkinkan penataan hasil secara sistematis dan runtut.

Dalam proses analisis, peneliti secara berulang membandingkan kutipan teks dengan kondisi sosial-politik yang melatarbelakanginya. Artinya, setiap pernyataan yang disampaikan oleh kandidat dianalisis tidak hanya dari bentuk bahasanya, melainkan juga dari aspek konteks seperti waktu, sasaran audiens, dan situasi ketika diksi tersebut digunakan. Hal ini sejalan dengan prinsip analisis wacana kritis yang melihat bahwa setiap bentuk bahasa merefleksikan praktik sosial serta hubungan kekuasaan tertentu. Peneliti juga memperhatikan aspek intertekstualitas, yaitu sejauh mana pernyataan kandidat mengacu pada narasi populer, idiom lokal, ataupun retorika politik khas Aceh. Semua hasil analisis didokumentasikan dalam bentuk matriks wacana demi menjaga konsistensi serta transparansi dalam proses interpretasi.

Metodologi ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali makna bahasa dalam debat politik secara mendalam dan sesuai konteks. Selain itu, rancangan metode ini cukup fleksibel namun tetap sistematis, sehingga dapat direplikasi secara terbatas untuk studi-studi serupa di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian teoritis dalam linguistik politik lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan metode kualitatif dalam studi bahasa dan komunikasi politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis terhadap transkrip debat resmi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024 mengungkap bahwa para kandidat memanfaatkan bahasa secara strategis untuk membangun citra diri, menegaskan gagasan, serta menjalin ikatan emosional dengan khalayak. Pilihan kata yang digunakan sarat dengan muatan ideologi, nilai-nilai religius, dan simbol-simbol budaya Aceh. Analisis ini menunjukkan bahwa diksi yang dipilih tidak bersifat netral, tetapi dikonstruksi secara sengaja guna menunjukkan kedekatan dengan identitas masyarakat Aceh, mengarahkan opini terhadap lawan politik, serta membangun narasi kepemimpinan yang berwibawa.

Melalui proses koding terbuka dan kategorisasi tematik, teridentifikasi empat tema utama yang mendominasi dalam penggunaan diksi dan gaya bahasa kandidat, yakni: (1) islamisasi retorika, (2) populisme lokal, (3) narasi syariat dan keadilan, serta (4) gaya insinuatif dan kontras terhadap lawan. Tema pertama, islamisasi retorika, dicirikan oleh penggunaan istilah seperti “pemimpin amanah”, “bermarwah syariat”, dan “rahmatan lil ‘alamin”, yang paling sering digunakan oleh kandidat dari partai politik

berbasis Islam. Sebuah kutipan menyebutkan, “Kami hadir bukan hanya membawa program, tapi juga membawa amanah umat dan tuntunan syariat yang lurus.” Pilihan diksi ini menunjukkan upaya eksplisit untuk menegaskan nilai-nilai keislaman dalam ruang politik. Keraf (2009) mengatakan Diksi adalah kemampuan seseorang untuk memilih kata yang tepat sesuai dengan situasi, nilai rasa, dan konteks makna yang diinginkan.

Tema kedua, yaitu populisme lokal, tampak dalam pemakaian istilah yang menggambarkan solidaritas sosial, misalnya “rakyat kecil”, “warga pedalaman”, “petani”, dan “suara rakyat Aceh”. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan keterikatan dengan kelompok masyarakat bawah. Seorang kandidat menyatakan, “Saya adalah bagian dari rakyat Aceh. Saya tumbuh di kampung, menyatu dengan penderitaan mereka.” Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan semangat kerakyatan, melainkan juga strategi untuk memperkuat identifikasi dengan mayoritas pemilih dari kalangan menengah ke bawah. Gaya bahasa tersebut menghidupkan dikotomi “kita” versus “mereka” dalam arena retorika publik.

Pada tema ketiga, narasi syariat dan keadilan, kandidat mengangkat konsep keadilan sosial berbasis nilai-nilai Islam melalui ungkapan seperti “adil dalam syariat”, “tidak zalim”, dan “pemerintahan bersih dan barakah”. Retorika ini menautkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip keislaman, baik sebagai nilai moral maupun kerangka kebijakan. Contohnya, seorang kandidat menegaskan, “Kami akan pastikan zakat dikelola transparan, adil, dan sesuai tuntunan syariah. Ini bukan janji, tapi kewajiban agama.” Ini menunjukkan keterkaitan antara wacana keagamaan dan tata kelola pemerintahan dalam politik lokal. Purwanti (2022) mengatakan bahwa Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di

tingkat daerah didorong oleh sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

Tema keempat menampilkan strategi insinuatif dan penggunaan gaya konfrontatif secara halus, ditujukan untuk mengkritik lawan tanpa menyebutkan nama secara langsung. Kalimat seperti, “Ada pemimpin yang dulu memegang kekuasaan, tapi rakyat masih hidup susah sampai hari ini,” merupakan contoh sindiran politik yang efektif dan tidak vulgar. Strategi ini berfungsi menggiring opini publik dengan tetap menjaga etika debat. Ini mengindikasikan bahwa bahasa dalam debat digunakan secara kompetitif, bukan hanya sebagai sarana penyampaian pesan, melainkan juga sebagai alat taktis dalam kompetisi politik.

Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam dan adat istiadat lokal, gaya berbahasa para kandidat dalam debat politik menunjukkan penyesuaian yang cermat terhadap norma komunikasi yang menjunjung tinggi kesantunan dan kehormatan. Para kandidat cenderung menghindari gaya bicara yang kasar atau konfrontatif secara langsung. Meskipun kritik dan sindiran tetap hadir sebagai bagian dari dinamika politik, penyampaian dilakukan secara halus dan terukur. Diksi yang digunakan sering kali mengedepankan struktur kalimat pasif, metafora, atau personifikasi untuk menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menyinggung secara personal. Misalnya, dalam kalimat “Keputusan-keputusan yang pernah menyakiti rakyat tidak boleh terulang lagi,” kritik tersirat diarahkan pada kepemimpinan sebelumnya, namun dikemas secara sopan, tanpa menyebut nama atau menyudutkan pihak tertentu secara eksplisit.

Strategi komunikasi semacam ini mencerminkan integrasi antara retorika politik modern dan nilai-nilai budaya Aceh

seperti *keuneubah* (kesopanan), *peumulia jamee* (memuliakan tamu/lawan bicara), dan *meurumpok* (musyawarah atau menyampaikan secara halus). Para kandidat sadar bahwa dalam masyarakat Aceh, cara berbicara mencerminkan karakter dan kredibilitas seseorang, sehingga komunikasi yang santun menjadi modal penting dalam membangun citra sebagai pemimpin yang *bermarwah* (berwibawa dan terhormat). Penggunaan simbolisme adat dan penghindaran gaya frontal juga memperlihatkan upaya menjaga harmoni sosial dalam konteks politik yang kompetitif. Dengan demikian, komunikasi politik di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai alat persuasi, tetapi juga sebagai cerminan integritas budaya dan etika lokal yang hidup dalam masyarakat.

Dari aspek non-verbal yang tercermin dalam transkrip ekspresi, ditemukan adanya pola intensifikasi emosional melalui pengulangan kata, penekanan intonasi (ditandai dengan huruf kapital), dan penggunaan interjeksi religius seperti “InsyaAllah”, “Bismillah”, serta “Na’udzubillah”. Elemen-elemen tersebut memperkuat dimensi performatif dalam debat dan memperlihatkan bagaimana aspek religius menjadi bagian penting dalam retorika politik Aceh. Seorang kandidat berkata: “Bismillah, kalau saya dipercaya, saya bukan hanya bekerja, tapi beribadah dalam memimpin.” Kutipan ini menegaskan peran sentral spiritualitas dalam bingkai komunikasi politik lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini menampilkan bahwa debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024 bukan sekadar forum penyampaian gagasan rasional, melainkan arena simbolik tempat terjadi kontestasi nilai, identitas, dan otoritas budaya. Pemilihan diksi dan gaya bahasa yang digunakan mencerminkan strategi untuk menarik simpati publik, menegaskan nilai-nilai dominan dalam

masyarakat Aceh, serta menggarisbawahi batas antara siapa yang dianggap “layak memimpin” dan “yang gagal”. Oleh karena itu, analisis linguistik terhadap debat politik ini memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika komunikasi politik yang berbasis pada kebudayaan local.

Penelitian ini menemukan bahwa pemilihan kata dan gaya bahasa dalam debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, agama, dan budaya setempat. Hasil ini mendukung teori analisis wacana kritis dari Fairclough, yang menyatakan bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang sarat dengan nilai-nilai ideologis dan relasi kekuasaan (Bacchini, 2018). Kata-kata seperti “amanah”, “adil dalam syariat”, atau “rakyat kecil” bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan, melainkan digunakan secara strategis untuk mencitrakan diri dan menjalin hubungan simbolik dengan publik.

Secara khusus, dominasi tema retorika keislaman dan narasi syariat dalam debat para kandidat di Aceh memperkuat hasil studi Sulistiyowati (2024) dan (Agustina, 2024) yang menyatakan bahwa komunikasi politik di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki fondasi religius kuat, cenderung mengadopsi idiom-idiom keagamaan dalam ranah retorika publik. Di Aceh, fenomena ini sangat nyata karena nilai-nilai syariat telah menjadi bagian dari struktur formal pemerintahan. Bahasa religius tidak hanya membentuk citra etis (etos), tetapi juga digunakan sebagai alat hegemoni budaya dalam membentuk pola pikir masyarakat.

Penelitian ini juga menambah dimensi baru pada studi Ardiansyah (2021) yang menyoroti kecenderungan penggunaan gaya bahasa populis dan diksi emosional dalam kampanye politik lokal. Dalam konteks Aceh, gaya populis tersebut dipadukan dengan simbol-simbol Islam dan

budaya adat. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kolektif lokal dalam analisis komunikasi politik, seperti yang disampaikan oleh Fathurrijal (2019) dalam kajian debat politik di DKI Jakarta yang lebih pluralistik dan pragmatis.

Selain itu, penggunaan strategi insinuatif dan gaya komunikasi konfrontatif secara halus terhadap lawan menunjukkan bahwa debat politik di Aceh tetap mempertahankan norma komunikasi lokal yang sopan. Berbeda dengan debat nasional yang sering menampilkan gaya menyerang secara terbuka, para kandidat di Aceh lebih memilih sindiran simbolik dan pernyataan tidak langsung. Hal ini mencerminkan penyesuaian terhadap nilai budaya Aceh yang mengutamakan kehormatan dan komunikasi yang santun (*peu haba*).

Secara teoretis, hasil kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan analisis wacana yang kontekstual dan lintas disiplin. Pendekatan tersebut harus mampu memahami tidak hanya struktur bahasa, tetapi juga aspek budaya, ideologi religius, dan relasi kekuasaan. Analisis wacana kritis terbukti mampu mengungkap makna tersembunyi dalam komunikasi politik lokal.

Secara praktis, temuan ini dapat menjadi panduan bagi aktor politik dan tim kampanye dalam menyusun pesan-pesan politik yang sesuai dengan norma dan harapan masyarakat setempat, tanpa kehilangan kekuatan persuasinya. Pendekatan yang sensitif terhadap konteks dapat meningkatkan efektivitas komunikasi politik.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam ranah komunikasi politik dan analisis wacana, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan bagi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan media. Dengan

menunjukkan bahwa komunikasi politik merupakan proses simbolik dan ideologis, Sebagaimana kata Saragih (2023) ideologi dan kebahasaan merupakan cerminan bahasa yang berfungsi sebagai alat representasi nilai, keyakinan, dan kepentingan politik. bukan sekadar pertukaran rasional mengenai program kerja, studi ini membuka ruang pemahaman yang lebih dalam tentang cara bahasa digunakan untuk membentuk persepsi, identitas politik, dan arah dukungan publik. Bagi penyelenggara pemilu, temuan ini penting untuk merancang format debat dan kampanye yang lebih adil, transparan, serta peka terhadap dimensi budaya dan ideologis. Sementara itu, bagi media, wawasan ini mendorong peliputan yang lebih kritis dan kontekstual terhadap narasi politik yang berkembang.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi politik berbasis bahasa di kalangan masyarakat. Dengan memahami bahwa ujaran politik syarat dengan makna terselubung, simbol budaya, dan kepentingan ideologis, publik diharapkan tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi mampu menafsirkan, mengevaluasi, dan mengkritisi pesan-pesan politik secara reflektif dan sadar. Literasi terhadap bahasa politik memungkinkan masyarakat mengenali manipulasi retorika, menghindari polarisasi yang dangkal, serta berpartisipasi secara lebih aktif dan cerdas dalam proses demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini turut mendorong terciptanya iklim politik yang lebih sehat, kritis, dan berkeadaban di tengah masyarakat yang majemuk seperti Aceh dan Indonesia secara umum.

Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukan studi perbandingan antarprovinsi guna mengkaji bagaimana gaya komunikasi politik bervariasi berdasarkan perbedaan budaya, agama, dan struktur sosial yang melekat di masing-masing daerah. Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik

sosiokultural yang unik, yang dapat memengaruhi cara para politisi menyusun wacana dan menyampaikan pesan-pesan politik mereka. Dengan melakukan perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola retorika spesifik yang muncul dalam konteks lokal tertentu serta memahami dinamika ideologis yang tersembunyi di balik pilihan bahasa. Studi semacam ini juga berpotensi mengungkap bagaimana nilai-nilai lokal diartikulasikan dalam komunikasi politik, baik untuk memperkuat legitimasi kandidat maupun membangun kedekatan emosional dengan konstituen. Fahkri (2021) Bahasa politik dalam kontestasi Pilkada Aceh merupakan sarana strategis bagi para kandidat untuk membangun citra religius, menegaskan identitas keislaman, serta mengonstruksi legitimasi.

Selain itu, pendekatan multimodal sangat disarankan dalam studi-studi lanjutan untuk menangkap dimensi non-verbal yang sering kali memainkan peran penting dalam efektivitas komunikasi politik. Elemen seperti gestur tangan, ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara merupakan bagian integral dari retorika yang tidak dapat dipisahkan dari aspek verbal. Penggunaan analisis multimodal akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang performa debat politik sebagai sebuah pertunjukan komunikasi yang kompleks dan penuh strategi. Dengan demikian, penelitian ke depan tidak hanya akan melihat "apa yang dikatakan", tetapi juga "bagaimana itu dikatakan", sehingga memberikan gambaran yang lebih kaya tentang cara politisi membentuk citra, membangun otoritas, dan memengaruhi persepsi publik secara verbal dan visual.

Denzin (2018) mengatakan Penelitian lanjutan sebaiknya juga mempertimbangkan persepsi audiens melalui metode survei atau wawancara, guna memahami bagaimana masyarakat

dari latar belakang berbeda menafsirkan pesan politik. Pendekatan ini akan memberikan pandangan lebih holistik terhadap efektivitas komunikasi politik.

Secara kritis, penelitian ini menyadari keterbatasannya karena hanya mengandalkan dokumentasi resmi debat dan belum mengeksplorasi tanggapan langsung dari publik. Meskipun pendekatan ini memungkinkan analisis struktural yang mendalam, namun belum mampu menggambarkan sepenuhnya bagaimana masyarakat menafsirkan bahasa debat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metode etnografi wacana atau analisis resepsi dalam penelitian lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam debat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024 bukan hanya sebagai alat komunikasi politik biasa, melainkan sebagai strategi wacana yang kompleks dan sarat makna ideologis, religius, dan budaya. Diksi-diksi yang dipilih para kandidat mencerminkan upaya membangun identitas politik, memperkuat hubungan simbolik dengan masyarakat Aceh, serta menegaskan posisi terhadap nilai-nilai dominan seperti syariat Islam, keadilan sosial, dan kesantunan adat. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, temuan ini memperlihatkan bahwa bahasa politik bekerja sebagai instrumen representasi dan arena kontestasi kekuasaan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman terhadap dinamika retorika politik lokal dalam kerangka linguistik kritis dan budaya. Penelitian ini menambah literatur mengenai analisis wacana politik dengan menyajikan data kontekstual berbasis lokalitas Aceh, yang selama ini masih kurang dieksplorasi. Temuan ini juga

mempertegas bahwa gaya bahasa politisi tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya, dan bahwa komunikasi politik yang efektif harus selaras dengan norma dan ekspektasi kultural audiens.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendorong perlunya pengembangan model analisis wacana yang lebih peka terhadap aspek kultural dan religius dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi kandidat politik, konsultan komunikasi, serta lembaga penyelenggara pemilu untuk merancang debat yang lebih substansial dan etis. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pedoman komunikasi publik yang lebih inklusif dan berbasis budaya lokal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan eksplorasi resepsi publik terhadap gaya bahasa politik ini melalui pendekatan etnografi komunikasi atau analisis respons masyarakat di media sosial. Studi komparatif antardaerah juga dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana konteks kultural memengaruhi konstruksi wacana politik. Penelitian lebih lanjut yang memadukan dimensi verbal dan nonverbal dalam debat politik juga akan memperkaya khazanah penelitian linguistik-politik di Indonesia.

REFERENSI

Agustina, A. (2024). Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Di Media Daring: Analisis Wacana Kritis (The Relocation Of Indonesia's Capital City In Online Media: A Critical Discourse Analysis). *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 14(2), 252. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v14i2.16701>

- Ardiansyah. (2021). Retorika dalam Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. *MABASAN*, 15(1), 95–112. <https://doi.org/10.26499/mab.v15i1.434>
- Bacchini, S. (2018). The power in language - Norman Fairclough, Language and Power. (3rd edn.) London: Routledge, 2015. Pp. 264. Paperback £30.99, ISBN: 978-1-13-879097-1. *English Today*, 34(1), 56–57. <https://doi.org/10.1017/S0266078417000013>
- Fathurrijal, F. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Retorika di Panggung Debat Antar Calon Gubernur DKI Jakarta 2017. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.31764/jail.v3i1.1365>
- Miles, M. B. , H. A. M. , & S. J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mohammad, T. T., Nurlaili, S., & Iqbal, M. (2021). Analisis Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Hikayat Soeltan Atjeh Marhoem (Soeltan Iskandar Muda). In *Online) Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan dan Keguruan* (Vol. 1, Issue 2).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (ed. revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyowati, S. (2024). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk tentang Pidato Politik Prabowo Subianto dalam Debat Calon Presiden pada Pemilihan Presiden. *Icon: Islamic Communication and Contemporary Media Studies*, 3(2), 170–181. <https://doi.org/10.35719/icon.v3i2.186>
- Triwicaksono, Y. D. B. B., & Nugroho, A. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah. *JURNAL LENSEA MUTIARA KOMUNIKASI*, 5(1), 133–145. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2037>
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yulianita, N. (n.d.). (2024). *Analisis Wacana Komunikasi Verbal pada Debat Pertama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2024*.
- Ahmadi Rulam. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz)
- Keraf, G. (2009). *Diksi*.
- Fakhri, M. (2021). Bahasa politik dalam kontestasi Pilkada Aceh: Analisis wacana kritis Fairclough.
- Denzin, NK, & Lincoln, YS (Eds.). (2018). *Buku Pegangan Sage tentang Penelitian Kualitatif*(edisi ke-5).
- Saragih Amrin, Yuni Khairina, & Khairunnisa Br. Batubara (2023) *Kontestasi Politik: Realisasi Ideologi dan Kebahasaan Calon Presiden Indonesia 2024*.
- Purwanti, A. (2022). Implementasi Tata Kelola yang Baik dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola*
- Setyonegoro, A., Kuntarto, E., Saharudin, & Angraini, D. (2025). *Menganalisis Retorika Politik dalam Pemilu Indonesia 2024: Pendekatan Analisis*

Wacana Kritis dan Implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan dan Media. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 17(3)

Erwin, S., & Maryani, R. (2024). *Bahasa dan Gaya Visual dalam Wacana Politik: Refleksi Identitas dan Dampaknya.* Jurnal KONFIKS, 11(2), 55–70.

Chaer (2012). *Linguistik Umum.* Jakarta: Rineka Cipta.